

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Iis Selpiani Barasa¹, Jusmer Sihotang²

^{1,2}Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP
Nommensen Medan

Email: iis.barasa@student.uhn.ac.id

Abstract

Village government administration constitutes an essential element in supporting governance implementation and public service delivery, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The implementation of village administration requires adequate capacity of village officials. Capacity refers to the ability, skills, understanding, attitudes, values, relationships, behaviors, motivation, resources, and conditions that enable individuals, organizations, networks, sectors, and broader systems to perform their functions in order to achieve established development goals over time. However, in practice, disparities remain in the level of capacity among village officials in understanding and implementing administrative governance in an orderly, systematic manner and in accordance with prevailing laws and regulations. In this context, Parlilitan Subdistrict, as part of Humbang Hasundutan Regency, holds a strategic role in providing guidance and assistance to village governments, as mandated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This community service activity aims to enhance the capacity of village officials through administrative governance assistance conducted during an internship program at the Parlilitan Subdistrict Office. The implementation method employed a mentoring and participatory approach, involving students directly in governmental administrative activities and office services within the subdistrict environment. The results of the program indicate that administrative assistance effectively improved the understanding and skills of village officials in managing governmental administration, while also strengthening coordination between village and subdistrict governments. Ultimately, the administrative mentoring initiative contributes to improving the performance of village governance in Parlilitan Subdistrict, Humbang Hasundutan Regency.

Keywords: *community service, village apparatus capacity, administrative assistance.*

Abstrak

Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu unsur yang penting dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai. kapasitas merupakan kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja ataupun sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya perbedaan tingkat kapasitas aparatur desa dalam memahami dan melaksanakan administrasi pemerintahan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kecamatan Parlilitan sebagai bagian dari Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki peran yang strategis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pendampingan

administrasi pemerintahan yang dilaksanakan selama masa magang di Kantor Camat Parlilitan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendampingan dan partisipatif, yaitu dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan administrasi pemerintahan serta pelayanan perkantoran di lingkungan kecamatan. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan administrasi pemerintahan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan administrasi pemerintahan desa ini adalah untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kata kunci: pengabdian masyarakat, kapasitas aparatur desa, pendampingan administrasi

PENDAHULUAN

Administrasi desa adalah proses pencatatan data dan informasi sistematis terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, mencakup bidang umum, penduduk, keuangan, dan pembangunan. Sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016, buku wajib meliputi buku peraturan, keputusan, inventaris, aparat, tanah, agenda, dan ekspedisi. Pengelolaan yang baik sangat krusial untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Banggai 2024). Pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di desa. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan dari tahapan kegiatan untuk pendataan dan informasi tentang pemerintahan desa pada buku register desa (Vestikowati et al. 2020). Administrasi pemerintahan desa yang tertata dengan baik akan menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Kecamatan Parlilitan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang membawahi 20 desa dengan kondisi geografis dan kapasitas aparatur desa yang berbeda-beda.

Perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam bidang administrasi pemerintahan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan memiliki peran penting sebagai pembina dan pendamping pemerintah desa agar pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Camat Parlilitan, penulis terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas administrasi pemerintahan dan pelayanan perkantoran yang berkaitan dengan pembinaan pemerintah desa. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membantu aparatur desa dalam meningkatkan pemahaman serta kemampuan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, artikel ini disusun untuk menggambarkan upaya penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan administrasi pemerintahan di Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Camat Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan pendampingan dan partisipatif dengan sasaran aparatur desa di wilayah Kecamatan Parlilitan. Kegiatan dilakukan 3 Januari 2026 selama sepekan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan selama masa magang dengan tahapan sebagai berikut:

Pada tahap persiapan, dilakukan pemahaman terhadap tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dalam pembinaan pemerintah desa serta mempelajari sistem administrasi pemerintahan yang berlaku. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan aparatur kecamatan untuk menentukan bentuk kegiatan pendampingan administrasi yang dapat dilaksanakan selama kegiatan magang.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan secara langsung dalam kegiatan administrasi pemerintahan di Kantor Camat Parlilitan. Kegiatan pendampingan meliputi membantu pelaksanaan administrasi perkantoran, mendukung pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta membantu proses koordinasi administrasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Tahap evaluasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan administrasi pemerintahan setelah kegiatan pendampingan berlangsung serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Instrumen yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan pengambilan data langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan administrasi pemerintahan desa berfokus pada penguatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola tata kelola, surat-menyurat, keuangan, kependudukan,

dan aset secara tertib sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016. Pendampingan ini bertujuan menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik yang responsif.



Gambar 1. Pelaksanaan pendampingan administrasi pemerintahan desa pada saat apel pagi

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan administrasi pemerintahan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegiatan ini difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui observasi, diskusi, dan praktik pengelolaan administrasi di lingkungan kantor desa.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain pencatatan dokumen yang belum seragam, pengarsipan yang belum tertata secara optimal, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintah.

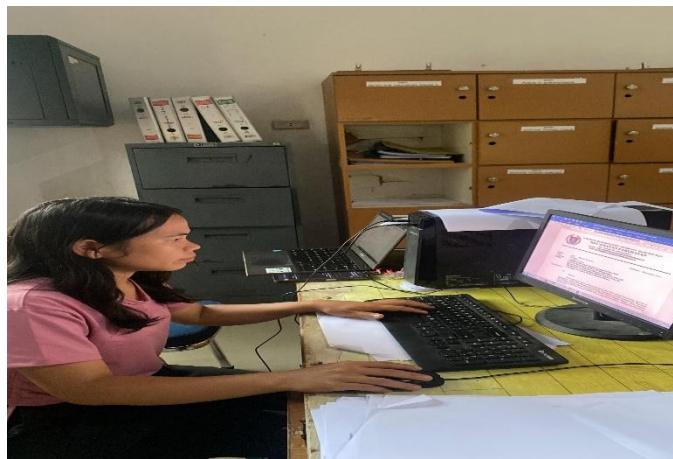
1. Penguatan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Administrasi Desa

Pendampingan administrasi pemerintahan selanjutnya diarahkan pada penguatan pengelolaan dokumen dan arsip administrasi desa. Arsip administrasi memiliki peranan strategis sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam kegiatan pendampingan ini, aparatur desa diberikan pemahaman mengenai pentingnya

pengelompokan dokumen berdasarkan jenis administrasi, seperti administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi pelayanan masyarakat.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya tertib arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penataan arsip yang baik diharapkan mampu mempermudah proses pencarian dokumen serta mendukung efektivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Pemerintahan Desa



Gambar 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Selain penguatan administrasi secara manual, pendampingan juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Aparatur desa didorong untuk mulai memanfaatkan perangkat komputer dalam penyusunan dan penyimpanan dokumen administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini dinilai penting dalam meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa serta mempercepat proses pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukung administrasi pemerintahan. Dengan adanya administrasi berbasis teknologi informasi, diharapkan proses pencatatan dan pengelolaan data desa dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan

menunjukkan bahwa pendampingan administrasi pemerintahan desa merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur desa.

Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkelanjutan dalam upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan serupa perlu dilaksanakan secara periodik dan terstruktur, disertai dengan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan agar dampaknya dapat terukur secara lebih komprehensif. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta komitmen aparatur desa menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program ini. Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Parlilitan dapat semakin efektif, transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

3. Dampak dan Implikasi Pendampingan

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan administrasi pemerintahan di Kecamatan Parlilitan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Aparatur desa menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, baik dari aspek pencatatan, pengarsipan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Pendampingan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pendampingan administrasi pemerintahan di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan kapasitas aparatur desa. Pendampingan yang dilaksanakan selama masa magang tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan administrasi, tetapi juga menekankan pada pemahaman prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Aparatur desa memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan surat-menyurat, penyusunan laporan administrasi, pengarsipan dokumen, serta penataan dokumen pemerintahan secara lebih sistematis, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peningkatan kompetensi ini secara langsung berkontribusi terhadap efisiensi kerja serta meminimalkan kesalahan administratif yang sebelumnya sering terjadi. Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan pendampingan juga

berdampak pada penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Adanya interaksi dan koordinasi yang intensif antara aparatur desa dengan pihak kecamatan selama proses pendampingan mampu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan harmonis. Hal ini mendorong terciptanya sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, responsif, dan terorganisir. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis aparatur, tetapi juga memperkuat sistem kerja dan pola koordinasi antarinstansi.

REFERENSI

- Belanger, F. & Carter, L., 2008. Trust and risk in e-government adoption. *Journal of Strategic Information Systems*, 17(2), 165-176.
- Erni, Rernawan. 2011. *Organization culture, budaya organisasi dalam perspektif ekonomi dan bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Fathoni, A. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government*. Andi Yogyakarta.
- Kencana, S. I. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Banggai, Kabupaten. 2024. "Penguatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai." 4(2): 83–87.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Daerah. Vestikowati, Endah, Kiki Endah, Eet Saeful Hidayat, and Administrasi Pemerintahan. 2020. "Abdimas Galuh." 2(September)
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hadi, S., & Wahyudi, A. (2019). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2)
- Mahdias, H. Z., Aryadita, H., & Wicaksono, S. A. (2019). Pengembangan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Untuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Berbasis Android. *jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 3(1)

- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV.
- Indra Prahasta. Moeleong, L. J. (2007). In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung: ALFABETA.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Norris, D. F. & Reddick, C. G. 2013. Local E- Government in te United States: Transformation of Incremental Change? *Public Administration Review*, 73
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 45–58. Republik Indonesia. (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. UNDP. (1997).
- Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme. Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Rangkuti, F. (2005). *Analisi SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustanto, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Tambunan M Rudi, 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure*. Penerbit: Maiesta. Jakarta.
- Victor M Situmorang, C. S. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yati, M. F. (2019). *Audit Sistem Informasi Pada Sistem E-Government dengan Menggunakan Framwork Cobit 5 (Studi Pada: Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi (SIGAP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok*.
- Lestari., Bandiyah., Wiwin. (2014). *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Studi kasus pengelolaan pengaduan masyarakat online Kota*

Denpasar pada Dinas Komunikasi dan Informatika). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Udayana.

M. Hardjana. 2003. Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Andriansyah. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa. Jakarta: FISIP Universitas

Prof. Dr Moestopo Beragama. Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Unpad: Bandung.